E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2921-2930
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

# Evaluasi Pendidikan Berbasis Kebutuhan Masyarakat Di SMP Negeri 1 Kairatu

**Maria Goreti Kilmas[1], Sundun Triwardani[2] , Hendelina Wael[3], Emma Rumahlewang[4], Izaak Hendrik Wenno[5]**

[1,2,3,4,5] Program Studi Magister Manajemne Pendidikan, Universitas Pattimura Ambon
e-mail: mariagoretikilmas150502@gmail.com

**Abstrak**

Penyelenggaraan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal memerlukan evaluasi yang komprehensif agar program yang dilaksanakan sekolah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih terdapatnya kesenjangan antara program pendidikan yang diselenggarakan sekolah dengan harapan dan kebutuhan nyata masyarakat setempat, khususnya di wilayah kepulauan Maluku. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat di SMP Negeri 1 Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dengan menggunakan model evaluasi Context, Input, Process, dan Product. Penelitian menerapkan pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif dengan desain penjelasan berurutan, melibatkan seratus sembilan puluh satu responden yang terdiri atas guru, siswa, orang tua, tokoh masyarakat, dan komite sekolah. Data dikumpulkan melalui angket berskala Likert, wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis kualitatif secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan berada pada kategori cukup baik dengan nilai rata-rata keseluruhan tiga koma dua delapan. Kompetensi pendidik memperoleh nilai tertinggi sebagai kekuatan utama sekolah, sedangkan keterlibatan masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana menjadi aspek yang paling memerlukan perhatian. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi pendidik, tetapi juga oleh kemitraan sekolah dengan masyarakat, relevansi kurikulum terhadap potensi lokal, dan kelengkapan sarana pembelajaran, sehingga menghasilkan rekomendasi strategis bagi kebijakan pendidikan di wilayah tersebut.

**Kata Kunci:** Evaluasi Pendidikan; Kebutuhan Masyarakat; Model CIPP; Mutu Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan.

**Abstract**

Educational provision in disadvantaged, frontier, and outermost regions requires comprehensive evaluation to ensure that school programs are genuinely responsive to

community needs and capable of improving the quality of education on a sustainable basis. This study is grounded in the persistent gap between the educational programs implemented by schools and the actual expectations and needs of local communities, particularly in the island region of Maluku. This study aimed to evaluate community needs based educational implementation at SMP Negeri 1 Kairatu, West Seram Regency, Maluku Province, using the Context, Input, Process, and Product evaluation model. A mixed methods approach with a sequential explanatory design was employed, involving one hundred and ninety one respondents consisting of teachers, students, parents, community leaders, and school committee members. Data were collected through Likert scale questionnaires, in depth interviews, observations, and document analysis, and were subsequently analyzed using descriptive statistical techniques together with interactive qualitative analysis. The findings revealed that the overall implementation of education was categorized as fairly good, with a grand mean score of three point two eight. Teacher competence achieved the highest score, confirming it as the school's primary strength, whereas community participation and the availability of facilities and infrastructure emerged as the components most in need of attention. These findings affirm that improving educational quality depends not only on teacher competence but also on strengthening school community partnerships, ensuring curricula reflect local potential, and enhancing learning facilities, thereby producing strategic recommendations for education policy in the region.

**Keywords :** Education Evaluation; Community Needs; CIPP Model; Education Quality; Education Provision.

## LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, mutu pendidikan tidak hanya diukur melalui capaian akademik peserta didik, tetapi juga melalui sejauh mana penyelenggaraan pendidikan mampu menjawab kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini menjadi penting terutama pada daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), termasuk Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemerataan akses, mutu layanan, dan relevansi pendidikan.

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu wilayah di Maluku yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas. Kondisi tersebut menuntut adanya penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kurikulum nasional, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan lokal masyarakat. Pendidikan di daerah seperti Kairatu idealnya menjadi ruang penguatan kompetensi peserta didik agar mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, memahami potensi daerah, serta berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara program pendidikan yang dilaksanakan sekolah dengan kebutuhan nyata masyarakat.

SMP Negeri 1 Kairatu sebagai salah satu sekolah menengah pertama yang memiliki peran penting dalam pelayanan pendidikan di Kecamatan Kairatu perlu dievaluasi secara komprehensif. Beberapa persoalan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan program sekolah, kurikulum yang belum sepenuhnya mengintegrasikan kearifan lokal dan potensi wilayah, serta kompetensi lulusan yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat setempat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menilai keberhasilan administratif dan akademik, tetapi juga menelaah kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi pendekatan yang relevan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi pendidikan yang sedang berlangsung dengan harapan masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai mitra dalam menilai, mengembangkan, dan memperbaiki mutu pendidikan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan dapat diterapkan sesuai kondisi lokal.

Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dipilih sebagai kerangka evaluasi karena mampu menilai penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Evaluasi konteks digunakan untuk melihat kesesuaian program sekolah dengan kebutuhan masyarakat; evaluasi input menilai ketersediaan sumber daya pendidikan; evaluasi proses menelaah pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah; sedangkan evaluasi produk mengukur hasil dan relevansi lulusan. Melalui model ini, penyelenggaraan pendidikan dapat dipahami secara lebih utuh, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dirasakan oleh peserta didik dan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan evaluasi berbasis kebutuhan masyarakat dengan model CIPP pada konteks sekolah menengah pertama di wilayah 3T Maluku. Penelitian ini tidak hanya mengukur mutu pendidikan dari perspektif internal sekolah, tetapi juga melibatkan persepsi guru, siswa, orang tua, tokoh masyarakat, dan komite sekolah. Dengan cara ini, hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, serta prioritas perbaikan penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Kairatu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat di SMP Negeri 1 Kairatu dengan menggunakan model CIPP. Evaluasi difokuskan pada delapan komponen utama, yaitu relevansi kurikulum, kualitas proses pembelajaran, penilaian dan evaluasi, kompetensi pendidik, keterlibatan masyarakat, sarana dan prasarana, relevansi lulusan, serta kepemimpinan dan manajemen sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan yang kontekstual, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kairatu.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sequential explanatory, yaitu analisis data kuantitatif dilakukan pada tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan analisis data kualitatif untuk memperdalam dan mengonfirmasi hasil penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif yang menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) sebagai kerangka evaluasi untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selama Maret–Juli 2024. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah menengah pertama terbesar di Kecamatan Kairatu yang melayani peserta didik dari berbagai desa dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Subjek penelitian berjumlah 191 responden yang terdiri atas 26 guru, 80 siswa, 60 orang tua/wali, 15 tokoh masyarakat, dan 10 anggota komite sekolah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling untuk guru, tokoh masyarakat, dan komite sekolah, sedangkan siswa dan orang tua dipilih menggunakan stratified random sampling berdasarkan jenjang kelas. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%.

Instrumen penelitian terdiri atas kuesioner, pedoman wawancara, lembar observasi, dan studi dokumentasi. Kuesioner dikembangkan berdasarkan indikator Model CIPP yang mencakup delapan komponen evaluasi, yaitu relevansi kurikulum, kualitas proses pembelajaran, sistem penilaian, kompetensi pendidik, keterlibatan masyarakat, sarana dan prasarana, relevansi lulusan, serta kepemimpinan dan manajemen sekolah. Instrumen menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari skor 1 (sangat tidak sesuai) hingga skor 5 (sangat sesuai). Sebelum digunakan, instrumen diuji validitas konstruk dan reliabilitasnya menggunakan Cronbach's Alpha, dengan nilai koefisien sebesar 0,887, yang menunjukkan tingkat reliabilitas sangat tinggi.

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan IBM SPSS Statistics 26 untuk memperoleh nilai rata-rata, persentase, dan standar deviasi pada setiap komponen evaluasi. Interpretasi hasil mengacu pada kategori skor, yaitu 1,00–1,79 (sangat kurang baik), 1,80–2,59 (kurang baik), 2,60–3,39 (cukup baik), 3,40–4,19 (baik), dan 4,20–5,00 (sangat baik). Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, serta penyusunan audit trail untuk meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Kairatu memperoleh nilai rata-rata keseluruhan (*grand mean*) sebesar 3,28, termasuk kategori cukup baik. Sebagian besar komponen telah berjalan sesuai standar yang diharapkan, namun masih terdapat aspek yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan

secara berkelanjutan. Nilai tertinggi diperoleh pada komponen kompetensi pendidik (3,80), sedangkan nilai terendah terdapat pada komponen sarana dan prasarana (2,66) serta keterlibatan masyarakat (2,75), yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di sekolah relatif lebih baik dibandingkan dukungan lingkungan dan sumber daya pendukung pendidikan. Ringkasan capaian setiap komponen evaluasi disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Elemental compositions of sampling sites**

| No | Komponen | Nilai Rata-rata | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Relevansi kurikulum | 3,52 | Baik |
| 2 | Kualitas proses pembelajaran | 3,32 | Cukup baik |
| 3 | Penilaian dan evaluasi pembelajaran | 3,63 | Baik |
| 4 | Kompetensi pendidik | 3,80 | Baik |
| 5 | Keterlibatan masyarakat | 2,75 | Cukup baik |
| 6 | Sarana dan prasarana | 2,66 | Cukup baik |
| 7 | Relevansi lulusan | 3,03 | Cukup baik |
| 8 | Kepemimpinan dan manajemen sekolah | 3,52 | Baik |
| | **Grand mean** | **3,28** | **Cukup baik** |

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Kairatu memiliki potensi yang baik untuk terus dikembangkan, terutama karena didukung oleh kompetensi pendidik yang memadai. Namun demikian, peningkatan mutu pendidikan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan kemitraan sekolah dengan masyarakat, pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual, peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan Model CIPP mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi penyelenggaraan pendidikan sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di wilayah 3T, khususnya Kabupaten Seram Bagian Barat.

Komponen relevansi kurikulum memperoleh nilai rata-rata 3,52, yang menunjukkan bahwa kurikulum telah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan peserta didik, namun belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik sosial, budaya, dan potensi ekonomi masyarakat Kairatu. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa masyarakat mengharapkan materi pembelajaran lebih banyak mengintegrasikan potensi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, serta nilai-nilai budaya pela gandong yang menjadi identitas masyarakat Maluku. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih memerlukan penguatan pada aspek kontekstualisasi pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan daerah, sebagaimana diamanatkan Kemendikbudristek (2022) bahwa pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka seharusnya dikontekstualisasikan dengan lingkungan dan potensi daerah masing-masing satuan pendidikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pattimura

(2020) yang menyatakan bahwa implementasi kurikulum di Kabupaten Seram Bagian Barat masih didominasi oleh pendekatan nasional sehingga belum sepenuhnya mengembangkan potensi lokal sebagai sumber belajar.

Komponen kualitas proses pembelajaran memperoleh nilai rata-rata 3,32, yang termasuk kategori cukup baik. Meskipun proses pembelajaran telah berjalan sesuai ketentuan, observasi menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional dengan pemanfaatan teknologi yang relatif terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas pembelajaran serta masih minimnya pelatihan guru mengenai model pembelajaran inovatif. Menurut teori konstruktivisme, proses pembelajaran yang efektif seharusnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar yang aktif dan kolaboratif. Oleh karena itu, penerapan model project-based learning, problem-based learning, maupun pembelajaran berbasis potensi lokal perlu terus ditingkatkan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan permasalahan nyata di lingkungan sekitarnya. Sejalan dengan hal tersebut, Sari, Suryana, Bentri, dan Ridwan (2023) menemukan bahwa penerapan project-based learning dalam Kurikulum Merdeka meningkatkan keterlibatan aktif dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan guru dan ketersediaan sumber belajar pendukung.

Komponen penilaian dan evaluasi pembelajaran memperoleh nilai rata-rata 3,63, yang termasuk kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan penilaian secara lebih komprehensif sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka, yaitu mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Sistem penilaian yang baik memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran sehingga guru dapat melakukan perbaikan strategi pembelajaran secara berkelanjutan. Temuan tersebut mendukung pendapat Stufflebeam dan Coryn (2014) bahwa evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran hasil belajar, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas program pendidikan. Kajian Rahmadayanti dan Hartoyo (2022) turut mengonfirmasi bahwa penerapan asesmen formatif dan sumatif secara berimbang merupakan wujud nyata semangat Merdeka Belajar, karena memberi ruang bagi guru untuk memantau perkembangan peserta didik secara berkelanjutan, bukan hanya menilai hasil akhir semata.

Komponen kompetensi pendidik memperoleh nilai tertinggi, yaitu 3,80, sehingga menjadi kekuatan utama penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Kairatu. Sebagian besar guru telah memenuhi kualifikasi akademik minimal serta memiliki sertifikat pendidik yang mendukung profesionalisme dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kompetensi guru yang baik menjadi modal penting dalam meningkatkan mutu pendidikan meskipun sekolah masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Rifai dan Nurdin (2021) yang menyatakan bahwa kualitas guru merupakan faktor paling menentukan keberhasilan pendidikan di daerah terpencil. Studi Vania, Septianingrum, Suhandi, dan Prihantini (2021) terhadap guru di wilayah 3T turut menegaskan bahwa revitalisasi peran guru sebagai pengelola kelas yang kreatif menjadi kunci keberlangsungan pembelajaran di tengah keterbatasan infrastruktur. Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan,

khususnya dalam penerapan Kurikulum Merdeka, integrasi teknologi pembelajaran, dan pengembangan pembelajaran berbasis proyek.

Komponen keterlibatan masyarakat memperoleh nilai rata-rata 2,75, sehingga menjadi salah satu aspek yang memerlukan perhatian utama. Rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kemitraan antara sekolah dengan orang tua maupun tokoh masyarakat belum berjalan secara optimal. Sebagian besar orang tua masih memandang pendidikan sebagai tanggung jawab sekolah, sementara komunikasi antara sekolah dan masyarakat belum dilakukan secara intensif. Padahal, konsep community-based education menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Epstein (2018) menegaskan bahwa kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang terjalin secara terstruktur terbukti meningkatkan capaian belajar peserta didik sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Latuconsina (2018) yang menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan sekolah di wilayah pesisir Maluku. Oleh karena itu, diperlukan forum komunikasi yang lebih aktif antara sekolah, komite sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat agar proses pengambilan keputusan pendidikan menjadi lebih partisipatif.

Komponen sarana dan prasarana memperoleh nilai rata-rata 2,66, yang merupakan nilai terendah dalam penelitian ini. Kondisi laboratorium, perpustakaan, jaringan internet, serta beberapa ruang belajar belum mampu mendukung pelaksanaan pembelajaran secara optimal. Keterbatasan fasilitas tersebut berpotensi menghambat implementasi pembelajaran yang inovatif, terutama dalam mendukung penggunaan teknologi digital sebagaimana diarahkan dalam Kurikulum Merdeka. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T tidak hanya bergantung pada kompetensi guru, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan serta sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi langkah strategis dalam mengatasi keterbatasan sarana pendidikan.

Komponen relevansi lulusan memperoleh nilai rata-rata 3,03, yang menunjukkan bahwa kompetensi lulusan telah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan potensi ekonomi lokal. Masyarakat mengharapkan lulusan memiliki keterampilan hidup (life skills), kemampuan berwirausaha, literasi digital, serta kemampuan memanfaatkan potensi pertanian, perikanan, dan sumber daya lokal lainnya. Sejalan dengan Yuliwulandana (2015), pengembangan muatan kecakapan hidup yang terintegrasi dalam pembelajaran dapat membekali peserta didik dengan keterampilan aplikatif bagi kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pembelajaran kontekstual melalui integrasi muatan lokal agar lulusan tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Komponen kepemimpinan dan manajemen sekolah memperoleh nilai rata-rata 3,52, yang menunjukkan bahwa tata kelola sekolah telah berjalan cukup baik dan berada pada kategori baik. Kepala sekolah dinilai mampu mengelola administrasi pendidikan secara efektif, mulai dari perencanaan program tahunan, pengelolaan keuangan sekolah, hingga supervisi

akademik terhadap guru, namun masih perlu memperkuat jejaring kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah lebih banyak berperan sebagai manajer administratif dibandingkan sebagai instructional leader yang secara aktif mendampingi guru dalam pengembangan proses pembelajaran. Sallis (2002) dalam kerangka manajemen mutu terpadu pendidikan menekankan bahwa kepemimpinan sekolah yang berorientasi pada mutu harus mampu membangun budaya kolaboratif serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya berfokus pada aspek administratif semata. Pandangan ini relevan dengan temuan penelitian ini, di mana penguatan kepemimpinan kolaboratif berpotensi besar mendorong perbaikan pada komponen-komponen lain yang masih lemah, khususnya keterlibatan masyarakat dan sarana prasarana. Mulyasa (2012) turut menegaskan bahwa keberhasilan manajemen berbasis sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam membangun kemandirian, kemitraan, dan partisipasi, sehingga sekolah tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat tetapi mampu mengoptimalkan sumber daya lokal secara kreatif. Kepemimpinan sekolah yang kolaboratif menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah karena mampu mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selaras dengan Epstein (2018), kepala sekolah yang secara aktif menginisiasi forum komunikasi dengan orang tua dan tokoh masyarakat cenderung lebih berhasil membangun rasa kepemilikan bersama terhadap keberlangsungan sekolah, dibandingkan kepala sekolah yang hanya menjalankan fungsi administratif rutin. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah, baik melalui pelatihan manajerial maupun pendampingan kepemimpinan instruksional, menjadi salah satu prioritas strategis dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Kairatu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Kairatu memiliki potensi yang baik untuk terus dikembangkan, terutama karena didukung oleh kompetensi pendidik yang memadai serta tata kelola kepemimpinan sekolah yang tergolong baik. Kedua kekuatan ini menjadi modal penting bagi sekolah dalam menghadapi berbagai keterbatasan yang masih dihadapi. Namun demikian, peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada dua komponen tersebut, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Penguatan kemitraan sekolah dengan masyarakat perlu dilakukan melalui forum komunikasi yang lebih rutin dan partisipatif, pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual perlu mengintegrasikan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan nilai budaya pela gandong, sementara penyediaan sarana dan prasarana yang memadai memerlukan sinergi lintas sektor antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, termasuk melalui optimalisasi Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa Model CIPP mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi penyelenggaraan pendidikan dari aspek konteks, input, proses, dan produk secara sekaligus, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai instrumen diagnostik yang menghasilkan rekomendasi strategis bagi kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang kontekstual dan partisipatif di wilayah 3T, khususnya Kabupaten Seram Bagian Barat.

## SIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Kairatu berada pada kategori cukup baik, dengan kompetensi pendidik sebagai kekuatan utama, sedangkan keterlibatan masyarakat dan sarana prasarana masih memerlukan perhatian serius, sehingga peningkatan mutu pendidikan di wilayah 3T memerlukan penguatan kemitraan sekolah-masyarakat dan dukungan infrastruktur, bukan hanya peningkatan kompetensi guru semata. Sekolah disarankan memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan orang tua serta tokoh masyarakat guna meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan pendidikan, sementara pemerintah daerah dan dinas pendidikan disarankan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah di wilayah 3T.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat. (2023). *Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (5th Ed.). SAGE Publications.

Epstein, J. L. (2018). *School, Family, And Community Partnerships: Preparing Educators And Improving Schools* (2nd Ed.). Routledge.

Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Rajawali Pers.

Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.

Latuconsina, N. (2018). Evaluasi Program Pendidikan Berbasis Kebutuhan Masyarakat Di Sekolah Pesisir Maluku Menggunakan Model CIPP. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 15*(2), 87–102.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). SAGE Publications.

Mulyasa, E. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.

Pattimura, S. (2020). Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Di SMP Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 27*(1), 14–28.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024.

Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu, 6*(4), 7174–7187.

Rifai, A., & Nurdin, M. (2021). Manajemen Berbasis Sekolah Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar: Studi Komparatif. *Jurnal Administrasi Pendidikan, 28*(1), 55–70.

Sallis, E. (2002). *Total Quality Management In Education* (3rd Ed.). Kogan Page.

Sari, A. M., Suryana, D., Bentri, A., & Ridwan, R. (2023). Efektifitas Model *Project Based Learning* (Pjbl) Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Basicedu, 7*(1), 432–440.

Scriven, M. (1991). *Evaluation Thesaurus* (4th Ed.). SAGE Publications.

Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model For Evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International Handbook Of Educational Evaluation* (Pp. 31–62). Kluwer Academic Publishers.

Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation Theory, Models, And Applications* (2nd Ed.). Jossey-Bass.

Sudjana, D. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah: Untuk Pendidikan Nonformal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Vania, A. S., Septianingrum, A. D., Suhandi, A. M., & Prihantini, P. (2021). Revitalisasi Peran Guru Dalam Pengelolaan Kelas Di Daerah Terdepan, Terluar, Dan Tertinggal (3T) Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Basicedu, 5*(6), 5142–5150.

Witkin, B. R., & Altschuld, J. W. (1995). *Planning And Conducting Needs Assessments: A Practical Guide*. SAGE Publications.

Yuliwulandana, N. (2015). Pengembangan Muatan Kecakapan Hidup (*Life Skill*) Pada Pembelajaran Di Sekolah. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 12*(2), 191–206.